

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met)

Oleh

HERDINA SEPTIANI

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih menjadi pro kontra khususnya di kalangan Hakim. Fenomena penjatuhan pidana di bawah batas minimum dapat dilihat dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met, Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Junawan Bin Samudi di bawah ketentuan ancaman pidana pada pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini berfokus kepada permasalahan mengenai bagaimana penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan apa faktor penghambat dalam penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan diskresi atau independensi Hakim. Hakim diperbolehkan menyimpangi ketentuan minimum dalam undang-undang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met dikarenakan pada fakta di persidangan Terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna dengan barang bukti yang relatif kecil. Faktor penghambat penjatuhan pidana di bawah batas minimum meliputi: Faktor hukum, ketentuan minimum khusus yang kaku dan belum diatur secara jelas mengenai penjatuhan pidana di bawah batas minimum dalam UU Narkotika sehingga menciptakan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Faktor penegak hukum, perbedaan

Herdina Septiani

pemahaman hakim yang cenderung kaku dan kurang fleksibel. Faktor sarana, terbatasnya lembaga rehabilitasi. Faktor masyarakat, masyarakat menuntut hukuman maksimal dan kurang memahami rehabilitasi. Faktor kebudayaan yaitu pandangan bahwa penjara adalah solusi utama.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya legalitas atau aturan yang mengatur secara jelas mengenai penjatuhan pidana di bawah batas minimum agar tercipta keseragaman di semua institusi. Hendaknya hakim untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan pidana minimum karena diperlukan fleksibilitas dalam mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Selain itu, perlunya pemerintah segera mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi baik sosial maupun medis.

Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Di Bawah Batas Minimum, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL SENTENCING BELOW THE MINIMUM THRESHOLD FOR NARCOTICS CRIMINAL OFFENDERS (Study of Court Decision Number 14/Pid.Sus/2023/PN Met)

By

HERDINA SEPTIANI

The imposition of criminal sentences below the minimum threshold for narcotics offenders remains controversial, particularly among judges. This phenomenon can be observed in Decision Number 14/Pid.Sus/2023/PN Met, where the Judge sentenced Defendant Junawan Bin Samudi below the minimum criminal threat provision specified in the article charged by the Public Prosecutor. This research focuses on the issues of how criminal sentences below the minimum threshold are imposed on narcotics offenders and what factors inhibit the imposition of such sentences.

The problem-solving approach used in this research combines normative juridical and empirical juridical approaches. The sources and types of data consist of primary and secondary data. The informants in this study were a Judge from the Metro District Court, a Prosecutor from the Metro District Attorney's Office, and an Academic from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results and discussion of this research indicate that imposing criminal sentences below the minimum threshold for narcotics offenders falls under judicial discretion or independence. Judges are permitted to deviate from the minimum statutory provisions based on Supreme Court Circular Letters (SEMA) Number 03 of 2015 and SEMA Number 1 of 2017, and based on legal facts revealed during trial. The below-minimum sentencing in Decision Number 14/Pid.Sus/2023/PN Met was due to trial evidence showing the Defendant was only proven to be a user with relatively small evidence. Inhibiting factors in imposing below-minimum sentences include: Legal factors, rigid special minimum provisions and unclear regulations regarding below-minimum sentencing in the Narcotics Law, creating conflict between legal certainty and justice. Law enforcement factors, differences in judges' understanding that tend to be rigid and inflexible. Facility factors, limited rehabilitation institutions. Community factors, public demands for maximum

Herdina Septiani

punishment and lack of understanding about rehabilitation. Cultural factors, namely the view that prison is the primary solution.

This research recommends the need for clear legal provisions regulating below-minimum sentencing to create uniformity across all institutions. Judges should improve their understanding of minimum criminal provisions as flexibility is needed in considering justice values. Additionally, the government needs to immediately work on the availability of both social and medical rehabilitation facilities and infrastructure.

Keywords: Criminal Sentencing, Below Minimum Threshold, Narcotics Crime